

**PERENCANAAN ANGGARAN, POLITIK ANGGARAN, DAN  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TERHADAP  
PENYERAPAN ANGGARAN  
(Studi Pada OPD Kabupaten Rokan Hilir)**

**Murhanita<sup>1)</sup>, Edfan Darlis<sup>2)</sup>, Yuneita Anisma<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : [murhanita499@gmail.com](mailto:murhanita499@gmail.com)

*The Effects Of Budget Planning, Budget Politics, And Implementation Of Goods/Services  
Procurement On Budget Absorption*

**ABSTRACT**

*This research aims to examine and analyze the effect of budget planning, budget politics, and implementation of goods/services procurement on budget absorption. This study used the primary data. The population in this study were the regional apparatus organization (OPD) in Rokan Hilir's regional government. This study used purposive sampling method. The data that could be analyzed were 71 data. Data was collected through a questionnaire. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with the SPSS program version 23. The result of this study showed that budget planning and implementation of goods/services procurement influence of budget absorption. While budget politics has not effect on budget absorption.*

*Keyword: Budget Absorption, Budget Planning, Budget Politics, and Implementation of Goods/Services Procurement.*

**PENDAHULUAN**

Setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta memerlukan anggaran. Pada sektor publik anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Dalam era otonomi daerah hingga sekarang, terjadi sebuah fenomena yang menarik yaitu

rendahnya penyerapan anggaran di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Penyerapan anggaran adalah pengeluaran keuangan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi satuan kerja.

Penyerapan anggaran yang rendah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga

kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi. Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penyerapan anggaran pada penelitian ini.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi penyerapan anggaran adalah perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran dapat diartikan sebagai suatu rancangan sebagai pengendali dan penentu arah yang akan ditempuh oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Penelitian Iqbal (2014) menyatakan bahwa perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, hal ini disebabkan karena semakin matang aparatur pemerinah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan anggaran maka kegiatan atau program yang ditargetkan akan berjalan dengan baik pula.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi penyerapan anggaran adalah politik anggaran. Politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia. Politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

Penelitian Abdullah (2010) menyatakan bahwa politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya penyerapan anggaran yang mana proses politik ini yaitu proses

penentuan kebijakan pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik.

Faktor terakhir yang diduga mempengaruhi penyerapan anggaran adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu tugas organisasi sektor publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Bastian, 2010 dalam Ramadhani, 2019).

Penelitian Priatno (2013) menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rifka Ramadhani (2019), namun dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari peneliti terdahulu. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, politik anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Berikut ini merupakan penjelasan dari teori yang terkait, serta konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Halim (2012:124) teori keagenan adalah teori hubungan prinsipal dengan agen. Dalam hubungan tersebut, prinsipal (misalnya, rakyat yang diwakili oleh DPRD) mempercayakan pengelolaan

kekayaannya kepada agen (misalnya, Pemerintah Daerah (Pemda)/Gubernur/Bupati/Walikota). Jadi, dalam konteks teori keagenan tersebut, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dapat bertindak sebagai agen maupun prinsipal. Sebagai agen, Pemda bertugas mengelola dana prinsipal, yaitu rakyat yang diwakili oleh DPRD. Sebaliknya, sebagai prinsipal, Pemda menyerahkan pengelolaan kekayaannya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertindak sebagai agen. Dalam kedudukannya sebagai prinsipal, Pemda harus mampu menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan oleh agennya, yaitu BUMD/Perusahaan Daerah (Perusda).

### **Anggaran**

Menurut Nurkholis (2019:4), “anggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai”. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu.

### **Penyerapan Anggaran**

Menurut Halim (2014:84) dalam Ksuma (2019) penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode tertentu (realisasi dari anggaran). Penyerapan anggaran bisa dikatakan sebagai suatu ukuran seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi. Efektivitas penyerapan anggaran

lebih menekankan pada pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pemerintah daerah penyerapan anggaran berarti kegiatan atas pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (UU APBD) yang disahkan oleh DPRD.

### **Perencanaan Anggaran**

Menurut Ramadhani (2019) perencanaan anggaran adalah proses kegiatan yang sistematis dalam menentukan anggaran yang tepat yang akan digunakan sebagai dasar penilaian baik oleh organisasi sektor publik maupun pemerintah. Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan.

Perencanaan anggaran tersusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Dokumen perencanaan memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang disebut dengan rencana kerja. Setiap Rencana Kerja menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi rencana dalam maksud menghasilkan setiap sasaran hasil kinerja pembangunan.

### Politik Anggaran

Menurut Wildavsky (2012:58) politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakup berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola, dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik. Lanjutnya lagi, politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi diantara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan atas keterbatasan sumber dana publik yang tersedia.

### Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh

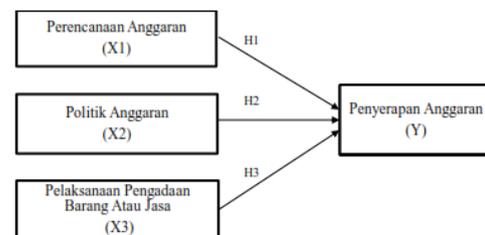
APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Jadi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh barang atau jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa (Sanjaya, 2018).

### Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Berikut ini adalah penjelasan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Gambar 1 Model Penelitian**



### Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Dalam perencanaan anggaran dibutuhkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan hasil dari perencanaan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Apabila perencanaan yang tidak matang akan berdampak terhadap kualitas perencanaan anggaran yang buruk dan menyebabkan anggaran yang tertuang dalam DPA harus direvisi kembali.

Oleh sebab itu, dibutuhkan perencanaan yang matang atau baik. Perencanaan anggaran yang baik akan mempermudah implementasi. Dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran, memperkuat perencanaan seperti ketepatan alokasi dan penentuan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan dapat berjalan lancar. Selain itu perlu ditegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempertajam program dan rencana kerja dengan melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat menghindari inefisiensi dan meningkatkan fleksibilitas OPD (Zarinah, 2016).

Hasil penelitian Iqbal (2018), Yumiati (2016), dan Wulandari (2018), menemukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sementara hasil penelitian Wirawan (2016) tidak menemukan pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan pendapat dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1: Perencanaan Anggaran Berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran**

**Pengaruh Politik Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran**

Politik anggaran tidak terlepas dari kepentingan terkait dengan siapa yang berperan dan bagaimana kemampuan negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Namun dalam memahami politik anggaran hanya

dimaknai dan dijalankan sebagai kepentingan jangka pendek dan menguntungkan pihak atau pejabat tertentu saja. Dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran biasanya hanya berupaya untuk mengakomodir kepentingan masing-masing pejabat yang terlibat, sementara kepentingan masyarakat terabaikan karena tidak pernah dilibatkan dan tidak ikut berpartisipasi dalam proses anggaran.

Menurut Abdullah (2010) politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, yang mana proses politik ini proses penetapan kebijakan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan elemen politik. Politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

Hasil penelitian Handayani (2017) dan Sanjaya (2018), menemukan bahwa politik anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sementara itu, Ramadhani (2019) tidak menemukan pengaruh dari perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan pendapat dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2: Politik Anggaran Berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran**

**Pengaruh Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran**

Dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemeritah telah

menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut memberikan mandat pengadaan/jasa menggunakan *E-Procurement* (E-Proc). *E-Procurement* adalah pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE (LKPP, 2010 dalam Angrina, 2017).

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai *E-Procurement* memerlukan waktu cukup lama dari pengumuman pengadaan hingga pengumuman pemenang lelang, sehingga menjadi salah satu penyebab lambatnya daya serap anggaran belanja. Diterapkannya pengadaan secara elektronik akan memberikan keuntungan bagi pengguna maupun penyedia lelang yaitu proses lelang tidak harus menyerahkan dokumen administrasi lelang yang biasanya bertumpuk-tumpuk, menghindari sanggah banding, sehingga terdapat efisiensi waktu dan biaya.

Hasil penelitian yang dilakukan Priatno (2013), Setyawan (2016), dan Alimuddin (2018) yang menyatakan bahwa ketika diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai *E-Procurement* ini memudahkan pemerintah daerah atau setiap OPD dalam memperoleh barang/jasa dengan cepat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ketika pemerintah daerah atau setiap

OPD telah memperoleh barang/jasa tersebut, maka secara otomatis anggaran telah diserap atau digunakan dengan baik sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Terjadinya penyerapan anggaran akan berpengaruh kepada perekonomian nasional secara keseluruhan, antara lain efektivitas alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi tepat sasaran, berdasarkan indikator keberhasilan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyerapan anggaran memiliki arti penting dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, hasil penelitian Nugroho (2017) menemukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan pendapat dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H3: Politik Anggaran Berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran**

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjumlah 27 OPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 6 Badan, dan 18 Dinas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah responden 81 orang.

## **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

### **1. Penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran dapat didefinisikan sebagai pengeluaran keuangan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi satuan kerja. Penyerapan anggaran bisa diartikan sebagai pencairan dana atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun tertentu (Wulandari, 2018). Penyerapan anggaran diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari pertanyaan dengan skala *likert* 5 point, melalui indikator:

1. Proporsional penyerapan anggaran.
2. Penumpukan kegiatan.
3. Presentase penyerapan anggaran.

### **2. Perencanaan Anggaran**

Perencanaan anggaran dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan yang sistematis dalam menentukan anggaran yang tepat yang akan digunakan sebagai dasar penilaian baik oleh organisasi sektor publik maupun pemerintah. Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan (Ramadhani, 2019). Perencanaan anggaran diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari pertanyaan dengan skala *likert* 5 point, melalui indikator:

1. Penetapan tujuan dan strategi.
2. Penyusunan program dan anggaran.

### **3. Politik Anggaran**

Politik anggaran dapat didefinisikan sebagai penetapan

berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerinah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola, dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik. (Wildavsky, 2012:58). Politik anggaran diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari pertanyaan dengan skala *likert* 5 point, melalui indikator:

1. Pengalokasian anggaran.
2. Asas kebutuhan
3. Asas keadilan.

### **4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh barang atau jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa (Sanjaya, 2018). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari pertanyaan dengan skala *likert* 5 point, melalui indikator:

1. Jumlah pejabat atau panitia pengadaan barang.
2. Pemahaman peraturan.
3. Pembentukan struktur organisasi.
4. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
5. Pemilihan penyedia barang/jasa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Statistik Deskriptif

Hasil tabulasi dari data yang telah terkumpul diolah menggunakan program SPSS versi 23. Deskriptif statistik variabel penelitian tertuang pada tabel 1. Berikut:

**Tabel 1 Descriptive Statistics**  
Descriptive Statistics

|  | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|--|----|---------|---------|-------|----------------|
| Perencanaan Anggaran (X1)              | 71 | 14      | 25      | 18,83 | 2,710          |
| Politik Anggaran (X2)                  | 71 | 14      | 20      | 18,10 | 1,692          |
| Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (X3) | 71 | 19      | 38      | 29,55 | 5,017          |
| Penyerapan Anggaran (Y)                | 71 | 13      | 24      | 18,62 | 2,549          |
| Valid N (listwise)                     | 71 |         |         |       |                |

Sumber: Data Olahan (2020)

### Hasil Uji Kualitas Data

#### 1. Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil olahan data uji validitas, didapatkan hasil bahwa keseluruhan nilai  $r$  tabel pada masing-masing variabel lebih kecil daripada  $r$  hitung. Sehingga bisa dikatakan valid.

#### 2. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil olah data, nilai Cronchbach Alpha dari keseluruhan variabel dependen dan independen penelitian ini menunjukkan Cronchbach Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan semua instrumen dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

### Hasil Uji Normalitas Data

**Tabel 2 Hasil Pengujian Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  | Unstandardized Residual                        |
|----------------------------------|--|
| N                                | 71   |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean,0000000<br>Std. Deviation,2,02469946      |
| Most Extreme Differences         | Absolute,070<br>Positive,056<br>Negative,-,070 |
| Test Statistic                   | ,070   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           | ,200 <sup>c,d</sup>                            |

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Olahan (2020)

Pada tabel di atas, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Hasil Uji Multikolinearitas

**Tabel 3 Hasil Pengujian Multikolinearitas Data**

| Model                                  | Collinearity Statistics |       |                                  |
|--|-------------------------|-------|----------------------------------|
|  | Tolerance               | VIF   | Keterangan                       |
| Perencanaan Anggaran (X1)              | 0,993                   | 1,007 | Tidak terdapat multikolinearitas |
| Politik Anggaran (X2)                  | 0,991                   | 1,009 | Tidak terdapat multikolinearitas |
| Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (X3) | 0,996                   | 1,004 | Tidak terdapat multikolinearitas |

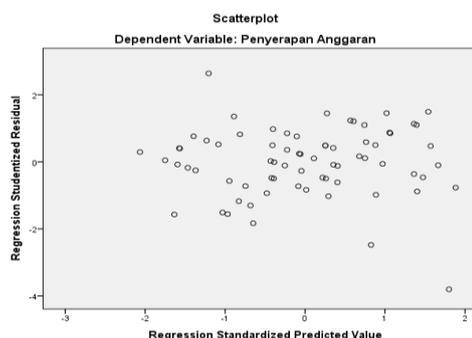
Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Data Olahan (2020)

Dari hasil perhitungan analisis di atas, diperoleh nilai *tollerance* untuk seluruh variabel independen  $> 0,10$  dan nilai *VIF*  $< 10$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel independen tersebut bebas dari multikolinearitas.

#### 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 2 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Data**



Sumber: Data Olahan (2020)

Dari grafik *Scatterplot* yang tertera di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal

ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antar dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2013:105). Model ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \beta_3 \cdot x_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penyerapan Anggaran

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = koefisien regresi Perencanaan Anggaran

$\beta_2$  = koefisien regresi Politik Anggaran

$\beta_3$  = koefisien regresi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

X1 = variabel Perencanaan Anggaran

X2 = variabel Politik Anggaran

X3 = variabel Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

e = variabel pengganggu

Berikut ini adalah hasil uji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 23:

**Tabel 4 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda**

| Model                                  | Unstandardized Coefficients <sup>a</sup> |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|--|--|------------|---------------------------|-------|------|
|  | B  | Std. Error | Beta                      |       |      |
| (Constant)                             | 1,569                                    | 3,515      |                           | ,446  | ,657 |
| Perencanaan Anggaran (X1)              | ,277                                     | ,092       | ,295                      | 3,026 | ,004 |
| Politik Anggaran (X2)                  | ,242                                     | ,147       | ,160                      | 1,646 | ,104 |
| Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (X3) | ,252                                     | ,045       | ,497                      | 5,106 | ,000 |

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Sumber: Data Olahan (2020)

Berdasarkan tabel di tersebut, diketahui hasil dari analisis menggunakan SPSS versi 23 adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,569 + 0,277X_1 + 0,242X_2 + 0,252X_3$$

Arti angka-angka dari persamaan tersebut adalah:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 1,569 yang artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka Penyerapan Anggaran sebesar 1,569.
2. Nilai koefisien regresi variabel Perencanaan Anggaran sebesar 0,277 yang artinya bahwa setiap Perencanaan Anggaran sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran sebesar 0,277 atau 27,7% dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel Politik Anggaran sebesar 0,242 yang artinya bahwa setiap Politik Anggaran sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran sebesar 0,242 atau 24,2% dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 0,252 yang artinya bahwa setiap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran sebesar 0,252 atau 25,2% dengan asumsi variabel lain tetap.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 5 Hasil Pengujian Determinasi ( $R^2$ )**

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | ,607 <sup>a</sup> | ,369     | ,341              | 2,070                      |

Predictors: (Constant), Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (X3), Perencanaan Anggaran (X1), Politik Anggaran (X2)

Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Sumber: Data Olahan (2020)

Dari tabel di atas diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,341. Artinya bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 34,1%, sedangkan sisanya 65,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

### Hasil Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

**Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis Pertama**

| Variabel Independen                    | t <sub>hitung</sub> | t <sub>tabel</sub> | Sig.  | Keterangan  |
|--|---------------------|--------------------|-------|-------------|
| Perencanaan Anggaran (X <sub>1</sub> ) | 3,026               | 1,996              | 0,004 | Berpengaruh |

a. *Dependent Variable:* Penyerapan Anggaran (Y)

**Sumber :** *Data Olahan (2020)*

Berdasarkan pada hasil pengujian secara parsial t pada hipotesis pertama didapat t hitung > t tabel yaitu 3,026 > 1,996 dengan nilai sig.t 0,004 < 0,005, ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Ketika perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran artinya pemerintah diharapkan mampu menggunakan sumber daya yang ada untuk menunjukkan pembangunan secara maksimal melalui perencanaan yang optimal yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Ini disebabkan karena, semakin matang aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan anggaran maka kegiatan atau program yang ditargetkan akan berjalan dengan baik pula dan besar kecilnya tingkat penyerapan anggaran belanja daerah dalam mendanai pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan anggaran.

### Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

**Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis Kedua**

| Variabel Independen                | t <sub>hitung</sub> | t <sub>tabel</sub> | Sig.  | Keterangan        |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------|-------------------|
| Politik Anggaran (X <sub>2</sub> ) | 1,646               | 1,996              | 0,104 | Tidak Berpengaruh |

a. *Dependent Variable:* Penyerapan Anggaran (Y)

**Sumber :** *Data Olahan (2020)*

Berdasarkan pada hasil pengujian secara parsial t pada hipotesis kedua didapat t hitung > t tabel yaitu, 1,646 < 1,996 dengan nilai sig.t 0,104 > 0,005, ini menunjukkan bahwa politik anggaran berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti politik anggaran tidak menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kepentingan politik atau pelaksanaan yang diajukan tidak sesuai dengan prioritas yang disepakati bersama.

Secara teori menurut Mardiasmo (2018) dapat dijelaskan bahwa anggaran merupakan alat politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai *agent* yang pengaruhnya cukup signifikan terhadap pembangunan di daerah, namun hal ini dipengaruhi oleh berbagai proses politik. Hal ini disebabkan karena pengambilan keputusan harus menentukan prioritas yang lebih utama dibandingkan prioritas lainnya. Namun dalam penelitian ini politik anggaran tidak mendukung dalam *agency theory*.

### Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

**Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis Ketiga**

| Variabel Independen                                 | t <sub>hitung</sub> | t <sub>tabel</sub> | Sig.  | Keterangan  |
|---|---------------------|--------------------|-------|-------------|
| Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (X <sub>3</sub> ) | 5,106               | 1,996              | 0,000 | Berpengaruh |

a. *Dependent Variable:* Penyerapan Anggaran (Y)

**Sumber :** *Data Olahan (2020)*

Berdasarkan pada hasil pengujian secara parsial  $t$  pada hipotesis ketiga didapat  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu,  $5,106 > 1,996$  dengan nilai  $\text{sig.} < 0,005$ , ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bisa mempengaruhi Penyerapan Anggaran karena ketika diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai *E-Procurement* ini memudahkan pemerintah daerah atau setiap OPD dalam memperoleh barang/jasa dengan cepat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Ketika pemerintah daerah atau setiap OPD telah memperoleh barang/jasa tersebut, maka secara otomatis anggaran telah diserap atau digunakan dengan baik sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Terjadinya penyerapan anggaran akan berpengaruh kepada perekonomian nasional secara keseluruhan, antara lain efektivitas alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi tepat sasaran, berdasarkan indikator keberhasilan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyerapan anggaran memiliki arti penting dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pengujian serta analisis atas hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran di OPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Artinya bahwa semakin baik atau matang dalam membuat

perencanaan anggaran, maka semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel Politik Anggaran tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran di OPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Artinya bahwa ketika politik anggaran ini tidak melibatkan kepentingan elemen politik maka akan menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran di OPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Artinya bahwa semakin baik pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diterapkan, maka semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran.

### **Keterbatasan**

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada, diantaranya yaitu:

1. Hanya beberapa responden yang bisa ditemui secara langsung untuk dilakukannya wawancara, mengingat kesibukan dari masing-masing responden.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu Perencanaan Anggaran, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Penelitian ini hanya meneliti pada OPD Kabupaten Rokan Hilir, sehingga untuk pemerintah provinsi atau kabupaten lain yang berbeda dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian.

### **Saran**

Dari kesimpulan dan segala keterbatasan yang telah diungkapkan

diatas, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Bagi Akademis

Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel independen maupun intervening/moderating yang diketahui dapat mempengaruhi Penyerapan Anggaran. Serta melakukan wawancara untuk melengkapi metode penelitian sehingga hasil yang didapat lebih baik.

Diharapkan juga untuk bisa mendapatkan data secara keseluruhan dari semua sampel yang telah ditetapkan, agar hasil yang didapat lebih maksimal.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dijadikan referensi untuk evaluasi yang berhubungan dengan penyerapan anggaran. Serta, diharapkan agar OPD dapat bekerjasama dengan mahasiswa dengan menanggapi kuesioner dengan sebaik-baiknya, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy. 2016. *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara*, E-jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Vol. 5(1) (2016).

Alimuddin. (2018). *Analisis Penyerapan Anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar*. Tesis. Universitas Hasanuddin.

Angrina, Rika. 2017. *Pengaruh Penerapan E-Procurement, Kompetensi Pejabat Pembuat*

*Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)*. E-jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang. Vol. 5(2) (2017).

Anisa, Indi Zaenur. 2017. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten*. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, Vol. 2(1) (2017).

Bastian, Indra. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2015-Cetakan Keempat.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2018-Cetakan Keempat.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi . 2012. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2018-Cetakan Keempat.

Handayani, Cut Huri. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2015 dengan SiLPA sebagai Variabel Moderating*. E-jurnal Akuntansi Universitas Sumatera Utara.

- Iqbal, M. 2018. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*. Tesis. Universitas Hasanuddin.
- Ksuma, Sri Rif. 2019. *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara*. Skripsi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo.2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Nugroho, R. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)*. Jurnal BPPK.
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press, 2019-Cetakan Pertama.
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- \_\_\_\_\_, No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- Ramadhani, Rifka. 2019. *Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat*. E-jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang. Vol.1(2) (2019).
- Sanjaya, Tessa. 2018. *Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Setyawan, A. 2014. *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro*. Tesis. Universitas Airlangga.
- Wildavsky dan Caiden. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Matapena Consultindo. Yogyakarta.
- Wulandari, Riska. 2018. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*. Tesis. Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.
- Yumiati, Fenny. 2016. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Serapan Anggaran SKPD Di Pemerintah Aceh*. E-jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Zarinah, M. 2016. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Magister Akuntansi.